

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratia* yang berarti pemerintahan atau otoritas. Dengan kata lain demokrasi berarti “pemerintahan oleh rakyat”. Atau definisi lain yang paling singkat tentang demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln pada 1863 yaitu *government of the people, by the people and for the people* atau dalam istilah lainnya, yang dikemukakan oleh Schumpeter (dalam Djafar), *the will of the people* yang artinya sebagai “kehendak rakyat”<sup>1</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh *Almond dan Verba* (dalam Djafar) menurut keduanya, demokrasi adalah proses penerapan nilai-nilai demokrasi dalam sebuah sistem politik yang lebih bersifat empiris. Dalam pengertian empiris, demokrasi mengandung arti sebagai pemerintahan oleh beberapa orang atas nama rakyat keseluruhan. Pemerintah demokratis terutama dilihat dalam hal persamaan hak politik dan hak-hak yang sah lainnya, seperti hak untuk memilih, hak untuk memiliki pandangan politik yang berbeda, hak untuk membuat pandangan politik lewat partai, dan hak bagi wakil yang dipilih untuk mengawasi kegiatan pemerintah.<sup>2</sup> Berangkat dari pengertian demokrasi yang telah dipaparkan mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat. Sehingga untuk mewujudkan pengertian di atas maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

---

<sup>1</sup>Djafar Massa 2015. *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, Hal. 29

<sup>2</sup>Djafar Massa Ibid Hal. 31

Samuel P. Huntington mengatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Pemilu merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi perwakilan.<sup>3</sup>Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter.Sedangkan upaya dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis diperlukan sebuah sistem yang mendukung kearah tersebut.

Adapun unsur-unsur yang dibutuhkan dalam sebuah pemilihan umum antara lain yang pertama, objek pemilu, yaitu warga negara yang memilih pemimpinnya, Kedua, sistem kepartain atau pola dukungan yang menjadi perantaraan pemilik suara dan para pejabat publik. Ketiga, adalah sistem pemilihan yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan (Lipset dan Rokkan, 1967).<sup>4</sup> Ketiga unsur tersebut merupakan suatu mata rantai yang saling berhubungan erat.Salah satu unsur terpenting bagi negara-negara yang demokrasinya telah matang maupun yang baru berkembang adalah partai politik.

Partai politik merupakan salah satu infrastruktur politik dalam sebuah negara, juga satu-satunya organisasi politik yang berkaitan dengan pemilihan umum dimana partai politik selalu dijadikan kendaraan politik bagi para elit politik. Adapun

---

<sup>3</sup>Labolo & Ilham, 2015 *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 45-46

<sup>4</sup>Labolo & Ilham, Ibid. Hal. 57

pengertian partai politik sebagai organisasi yang didalamnya terdapat sekelompok warga yang terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka (Roger H. Soltau)<sup>5</sup>

Partai politik memiliki fungsi utama ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Terkait dengan fungsi partai politik Miriam Budihardjo menyebutkan bahwa fungsi partai politik sebagai berikut, 1). Sarana komunikasi politik, 2). Sarana sosialisasi politik, 3). Rekrutmen politik dan, 4). Pengatur konflik.<sup>6</sup>

Tentunya dari empat fungsi yang disebutkan diatas, dikarenakan partai politik memiliki kedudukan dan peran yang cukup besar dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia melalui pemilihan umum yang bermartabat, maka salah satu faktor pendukung untuk mencapai itu semua adalah melalui proses sosialisasi politik yang dijalankan oleh partai politik.

---

<sup>5</sup>Labolo & Ilham Ibid. Hal. 12

<sup>6</sup>Labolo & Ilham, Ibid. hal. 16 (penjelasan)

(a), Sarana komunikasi politik adalah proses penyampain informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat, dari masyarakat kepada pemerintah (b), Sarana sosialisasi politik ialah pembentukan sikap dan orientasi politik bagi para anggota masyarakat. (c), Rekrutmen politik merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dimedia komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan latihan (*Gabriel Almond*). Selanjutnya, (*Jack C. Plano*) proses rekrutmen sebagai pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistemso sial. Sedangkan rekrutmen politik, menunjukkan pengisian pada posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. (d), Pengetur konflik, merupakan sebuah peristiwa yang sering muncul didalam negara yang demokratis, sehingga konflik jangan dianggap sebagai pengahambat dalam mencapai suatu tujuan tetapi hendaknya konflik dipahami sebagai jalan untuk mencapai kebaikan bersama, kemudian kebaikan bersama akan tercapai apabila partai politik mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui cara-cara yang dialogis.

Dalam sosialisasi politik dapat ditempuh dengan dua cara yakni, pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

Pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan cara bagaimana berpolitik yang sehat, bersaing secara sehat dan mendidik masyarakat untuk bersaing secara sehat, untuk mematuhi aturan. Sedangkan indoktrinasi politik ialah proses yang dilakukan secara sepihak oleh penguasa untuk menanamkan nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik oleh pihak penguasa tersebut kepada masyarakat.<sup>7</sup> Maka untuk menciptakan sebuah budaya politik yang baik tentunya membutuhkan kesadaran dari partai untuk melaksanakan pendidikan politik terhadap kader maupun masyarakat. Dengan banyaknya partai politik yang ada di Indonesia jika benar-benar menjalankan fungsinya dalam melakukan sosialisasi politik terhadap masyarakat maka tentu masyarakat juga akan lebih dalam memahami politik.

Adapun sistem kepartaian yang dianut oleh sebuah negara, sistem kepartain ini terbagi atas tiga bagian yakni sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multipartai. Di Indonesia, menganut sistem multipartai, mengingat adanya keanekaragaman budaya politik yang ada pada negara Indonesia. Sehingga pada tahun 2014 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu terdiri dari sepuluh partai, salah satu partai tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Pada tahun

---

<sup>7</sup>Labolo & Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Teori, konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: raja grafindo persada, 2015. Hal. 20.

2014 Partai Amanat Nasional yang berada di Kabupaten Kupang turut mengambil bagian dalam kontestasi pemilihan legislatif, dan pada tahun tersebut, kader dari Partai Amanat Nasional yang berhasil menduduki kursi legislatif di Kabupaten Kupang untuk periode 2014/2019 ini mencapai tiga kursi.

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2014**

<b>Dapil Kupang I</b>	<b>Dapil Kupang II</b>	<b>Dapil Kupang III</b>	<b>Dapil Kupang IV</b>	<b>Total suara</b>
4.567	2.046	970	4.047	11.630

Sumber: KPU-D Kabupaten Kupang

**Tabel 2**  
**Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kupang Tahun 2014**

<b>No</b>	<b>Nama Dapil</b>	<b>Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)</b>
<b>1</b>	<b>Kupang I</b>	<b>104.572</b>
<b>2</b>	<b>Kupang II</b>	<b>65.454</b>
<b>3</b>	<b>Kupang III</b>	<b>64.940</b>
<b>4</b>	<b>Kupang IV</b>	<b>95.356</b>
<b>Total</b>		<b>330.322</b>

Sumber: KPU-D Kabupaten Kupang

. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan suara dan kursi dari kader Partai Amanat Nasional belum mencapai hasil yang ditargetkan oleh Partai Amanat Nasional di Kabupaten Kupang yakni empat (4) kursi dengan target satu daerah pemilihan (Dapil) memperoleh satu kursi. Rendahnya perolehan suara yang diraih oleh kader Partai Amanat Nasional diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

terdiri dari, *pertama*, diduga kurangnya sosialisasi Partai Amanat Nasional terhadap kader maupun masyarakat, hal ini bisa dilihat dari tabel diatas yang menunjukkan perolehan suara pada daerah pemilihan (Dapil) III pada tahun 2014 yang terdiri dari tujuh (7) kecamatan yakni, Kecamatan Takari, Kecamatan Amfoang Selatan, Kecamatan Amfoang Tengah, Kecamatan Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kecamatan Amfoang Utara, dan Kecamatan Amfoang Timur. Dari ketujuh kecamatan ini yang terbilang susah dijangkau dengan jarak tempuh yang begitu jauh dan diperparah lagi dengan akses ke kecamatan-kecamatan tersebut yang sangat terisolir maka partai politik mengalami kesulitan untuk melakukan sosialisasi politik terhadap masyarakat maupun kadernya yang berdomisili di dapil (daerah pemilihan) tersebut, sehingga berdampak pada eksistensi partai di dapil tersebut. *Kedua* diduga kurangnya perhatian partai terhadap keberadaan kader-kadernya sehingga dalam setiap ajang pesta demokrasi yang diselenggarakan di Kabupaten Kupang selalu saja tidak menentu arah untuk melakukan konsolidasi atau mencari basis pendukungnya. *Ketiga*, diduga kurangnya partisipasi aktif kader-kader dalam setiap momentum pemilihan legislatif yang terbilang pasif. Karena dari sekian banyaknya kader yang ada di Kabupaten Kupang kurang lebih 500 orang dan tersebar di 24 kecamatan, tetapi Partai Amanat Nasional (PAN) masih kesulitan untuk menjaring kader-kader yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan legislatif (pileg). Sehingga, dalam hal ini partai harus bekerja keras menjaring orang-orang baru yang bukan kader atau pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Dari masalah-masalah tersebut diduga belum adanya kesadaran pengurus ditingkat DPD Partai Amanat Nasional dalam melaksanakan pendidikan politik yang bertujuan

untuk membentuk karakter politik, meningkatkan solidaritas politik dalam membesarkan dan menjaga eksistensi partai, memberikan pengetahuan tentang tugas, hak dan kewajiban, serta meningkatkan kapasitas kader dalam politik. *Keempat*, dalam menjalankan roda partai diduga kurang adanya kekompakan, atau keharmonisan dari pengurus partai sehingga hal-hal penting seperti pendidikan politik bagi kader ataupun pengurus belum diperhatikan dengan serius. Selanjutnya, pendidikan politik bagi kader Partai yang tidak berjalan maksimal diduga penyebab lainnya adalah pemahaman pengurus terhadap ideologi partai yang bisa dikatakan kurang mendasar, sehingga pengurus ataupun kader hanya menjadikan partai sebagai alat untuk mencapai kekuasaan tetapi mengabaikan fungsi partai dalam mencerdaskan pengurus/kader maupun masyarakat. Tentu hal ini akan berdampak pada eksistensi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Kupang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kupang**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terkait dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Kupang

## 2. Faktor-Faktor Apakah Saja Yang Mempengaruhi Penerapan Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Amanat Nasional di Kabupaten Kupang

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Menggambarkan fungsi sosialisasi politik (pendidikan politik) Partai Amanat Nasional bagi kadernya di Kabupaten Kupang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1 Manfaat teoritis/akademis yaitu

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis bagi Universitas Katolik Widya Mandira Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

#### 2 Manfaat praktis yaitu:

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
- b) Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengurus Partai Amanat Nasional dalam penerapan Sosialisasi Politik melalui pendidikan politik bagi kader Partai Amanat Nasional Kabupaten Kupang